PENGAARUH KOMUNIKASI TERHADAP IMPLEMENTASI KEBIJAKAN AKTA KELAHIRAN DI DESA SUNGAI BESAR KECAMATAN MATAN HILIR SELATAN KABUPATEN KETAPANG

Hidayat

Program Studi Ilmu Pemerintahan Kerjasama Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat

E-mail : dayat_borneo28@yahoo.co.id

Abstrak

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar Pengaruh Komunikasi Terhadap Implementasi Kebijakan Akta Kelahiran Di Desa Sungai Besar Kecamatan Matan Hilir Selatan Kabupaten Ketapang. Penelitian ini berangkat dari teori yang dikemukakan oleh para Ahli yang kemudian dirujuk kepada permasalahan yang terjadi di desa Sungai Besar Kecamatan Mtan Hilir Selatan Kabupaten Ketapang. Komunikasi diduga sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan akta kelahiran di Desa Sungai besar. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif. Dari angket yang disebarkan, diperoleh data yang kemudian diolah menggunakan program komputer *Statistical Product and Service Solutions* (SPSS) V.19 untuk menguji hipotesis yang diajukan. Sampel yang diambil pada penelitian ini adalah Kepala Keluarga yang belum memiliki Akta Kelahiran yakni sebanyak 71 orang. Hasil penelitian ini adalah terdapat pengaruh yang signifikan antara komunikasi terhadap implementasi kebijakan akta kelahiran di Desa Sungai besar. Hal ini dibuktikan dengan nilai koefisien korelasi yang positif yaitu sebesar 0,611. Pengaruh Komunikasi terhadap implemntasi kebijakan akta kelahiran di Desa Sungai Besar sebesar 37,33%, sedangkan 62,67% lainnya dipengaruhi oleh faktor-faktor lain di luar penelitian ini.

Kata kunci: komunikasi, implementasi, Kebijakan, akta kelahiran.

Abstract

This script had aim to determine how much influence of communications towards implementation Of Birth Certificate In Sungai Besar Village South Matan Hilir district Ketapang Regency. This study based by expert's theories then compared by the problem that happened at Sungai Besar Village South MatanHilir District Ketapang Regency. Communication is suspected as one of the factors that influence the implementation in the birth certificate at the Sungai Besar Village. This study use quantitative research methods. Based by questionnaires were distributed, get the data then processed using a computer program Statistical Product and Service Solutions (SPSS) V.19 to test the hypothesis. The Samples taken to a Head of family yet have birth certificates that as many as 71 people. The result of this study that found a significant difference between the communication of implementation in the birth certificate of Sungai Besar Village. Evidenced by the positive value of the correlation coefficient is equal to 0.611. The effect of Communication on policy implementation birth certificate in the village of Sungai Besar at 37,33%, while 62.67% are influenced by other factors outside the study.

Keywords: communication, implementation, Policies, birth certificates.

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Penelitian

Implementasi kebijakan merupakan bagian yang sangat vital dari suatu kebijakan, karena berhasil atau tidaknya suatu kebijakan dapat diukur dari implementasi atau pelaksanaan dari kebijakan tersebut. Implementasi kebijakan adalah tujuan akhir yang hendak dicapai oleh para pembuat kebijakan. Persiapan dan perencanaan yang baik akan sangat menentukan berhasil atau tidaknya kebijakan yang telah dibuat oleh para pengambil keputusan. Dengan berlakunya UU No 32 Tahun 2004 maka pemerintah Daerah mempunyai wewenang untuk melaksanakan urusannya sendiri. Dalam pelaksanaan otonomi daerah tersebut maka diperlukanya adanya suatu kebijakan. Kebijakan Pemerintah Daerah tersebut dituangkan dalam bentuk peraturan Daerah, yang dibuat berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Undang – Undang.

Untuk melindungi hak – hak anak yang dilahirkan dalam setiap waktu maka pemerintah melalui **UU No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan** membuat suatu peraturan yang berisikan tentang perlindungan dan hak – hak seorang anak yang baru dilahirkan. Tujuan pemerintah mengeluarkan Undang – Undang tentang administrasi kependudukan yakni untuk mengubah persepsi masyarakat yang selama ini hanya menganggap akta kelahiran sebagai pencatan sipil belaka, melainkan untuk mendapatkan hak – hak lainya.

Sesuai dengan Undang- undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi
Kependudukan disebutkan bahwa kegunaan akta kelahiran sebagai berikut :

a. Merupakan alat bukti yang paling kuat dalam menentukan kedudukan hukum seseorang.
b. Merupakan akta otentik yang mempunyai alat pembuktian sempurna didepan hakim atau pengadilan.
c. Memberikan kepastian hukum yang sebenar-benarnya tentang kejadian - kejadian mengenai kelahiran, kematian, perkawinan, dan pengakuan anak serta perceraian.
d. Dari segi praktisnya akta kelahiran pada khususnya di Catatan Sipil dapat digunakan untuk tanda bukti yang otentik dalam hal pengurusan paspor kewarganegaraan, keperluan sekolah, bekerja, masuk TNI, menentukan status waris dan sebagainya.

Menindaklanjuti hal tersebut Pemerintah Kabupaten Ketapang melalui Perda Kabupaten Ketapang No 18 Tahun 2009 membuat suatu kebijakan tentang kependudukan dan pencatatan sipil. Dalam mengkaji pelaksanaan Perda Kabupaten Ketapang No 18 Tahun 2009 tentang kependudukan dan pencatatan sipil pemerintah Kabupaten Ketapang harus mempertimbangkan faktor – faktor yang menentukan keberhasilan dari kebijakan yang telah dikeluarkan tersebut. Edwards III (dalam Widodo, 2008:96) berpendapat dalam model implementasi kebijakannya bahwa keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh faktor-faktor sebagai berikut:

1. *Bureaucratic structure* (struktur birokrasi)
2. *Resources* (sumber daya)
3. *Disposition* (sikap pelaksana)
4. *Communication* (komunikasi)

Empat faktor tersebut sangat mempengaruhi berhasil atau tidaknya implementasi Perda Kabupaten Ketapang No 18 Tahun 2009 tentang kependudukan dan pencatatan sipil. Namun yang sangat diperhatikan dalam Implementasi Perda tersebut yakni dari faktor

komunikasi. Komunikasi dalam hal ini diartikan sebagai penyampaian kebijakan oleh Ppihak yang berwenang. Informasi kebijakan publik perlu perlu disampaikan kepada pelaku kebijakan agar para pelaku kebijakan dapat mengetahui, memahami apa yang menjadi isi, tujuan, dan arah dari kebijakan yang telah dibuat tersesbut. Untuk memberikan informasi kepada masyarakat pemerintah melakukan sosialisasi ke Desa atau Kecamatan yang minim membuat akta kelahiran.

Namun didalam didalam pelaksanaan implementasi kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Ketapang melalui Perda Kabupaten Ketapang No 18 Tahun 2009 tidaklah berjalan mulus seperti yang diharapkan. Berdasarkan pernyataan Kepala Bidang Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Ketapang Joko Wijanarko yang dimuat dalam harian Equator pada hari Kamis, tanggal 6 Oktober 2011 tercatat sebanyak 440.239 jiwa masyarakat Kabupaten Ketapang belum memiliki akta kelahiran. Secara rinci pernyataan Kepala Bidang Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) diuraikan sebagai berikut :

> "Kepala Bidang Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ketapang, Joko, mengungkapkan bahwa kesadaran masyarakat dalam membuat akta kelahiran masih sangat rendah. Ini, katanya, terlihat dari masih sedikitnya masyarakat yang membuat akta kelahiran.
>
> Berdasarkan database SIAK Kabupaten Ketapang, jumlah penduduk Kabupaten Ketapang sebanyak 543.474 jiwa, yang mempunyai akta kelahiran baru sebanyak 103.235 jiwa, sedangkan yang belum mempunyai akta kelahiran sebanyak 440.239 jiwa," ungkapnya
>
> Dijelaskan Joko, selain masih belum adanya kesadaran masyarakat akan pentingnya akta kelahiran, jauhnya jangkauan masyarakat dari daerah pedalaman ke kabupaten serta masih rendahnya SDM membuat masyarakat enggan membuat akta kelahiran.
>
> Melihat kondisi tersebut, lanjut Joko, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ketapang terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk menjelaskan arti pentingnya akta kelahiran. Selain itu, dibentuk UPTD-UPTD di enam kecamatan serta penggunaan mobil keliling untuk melayani masyarakat di daerah pedalaman-pedalaman yang akan membuat akta kelahiran.
>
> Dikatakannya, terhitung Januari 2012 pelaksanaan catatan kelahiran yang melampaui batas waktu satu tahun dilakukan berdasarkan penetapan pengadilan. Karena itu, kata Joko, Sekda Kabupaten Ketapang mengimbau seluruh lapisan masyarakat melalui kepala desa, lurah, dan petugas RT/RW segera mengurus akta kelahiran sesuai persyaratan yang telah ditetapkan.
>
> Adapun syarat-syarat pembuatan akta kelahiran, katanya, melampirkan keterangan lahir dari bidan atau rumah sakit atau klinik atau kepala desa, surat nikah, fotokopi Kartu Keluarga (KK) yang sudah berbasis SIAK dan KTP kedua suami istri. Sementara untuk warga negara asing, harus melampirkan fotokopi paspor. (Diinput oleh harian equator melalui www.equator.com pada tanggal 6 november 2011)

Informasi diatas menunjukan rendahnya partisipasi masyarakat Kabupaten Ketapang dalam pembuatan Akta Kelahiran. Salah satu desa yang rendah dalam pembuatan akta kelahiran yaitu Desa Sungai Besar. Dari 4199 Jiwa Jumlah penduduk Desa Sungai Besar hanya 1509 jiwa yang meiliki akta kelahiran. Bila dipersentasekan hanya 35,81% penduduk yang Desa Sungai Besar yang memiliki akta kelahiran, berarti masih ada 64,19% penduduk yang belum memiliki akta kelahiran (kantor Desa Sungai Besar).

Padahal sesuai dengan Perda Kabupaten Ketapang No 18 Tahun 2009 pasal 21 yang bebunyi :

1. Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh orang tua dari anak yang lahir atau orang lain berdasarkan surat kuasa yang sah kepada pejabat pencatatan sipil setempat paling lama 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran
2. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pejabat pencatatan sipil mencatat pada

register akta kelahiran dan menerbitkan kutipan akta kelahiran.

3. Pencatatan kelahiran dalam register akta kelahiran dan penerbitan kutipan Akta Kelahiran terhadap peristiwa kelahiran seseorang yang tidak diketahui asal usulnya atau keberadaan orang tuanya, didasarkan pada laporan orang yang menemukan dilengkapi berita acara pemeriksaan dari kepolisian

Hal ini tentu merupakan masalah yang serius bagi Pemerintah daerah Kabupaten Ketapang. Banyak faktor yang mempengaruhi rendahnya partisipasi masyarakat dalam pembuatan akta kelahiran. Faktor faktor yang membuat rendahnya partipasi masyarakat dalam pembuatan akta kelahiran diduga karena hal – hal sebagai berikut :

1. Kurangnya sosialisasi yang diberikan oleh aparat pemerintah (aparatur Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ketapang) tentang pentingnya pembuatan akta kelahiran untuk seluruh masyarakat
2. Keadaan sosial masyarakat yang masih banyak belum sejahtera, hal ini terlihat jelas dengan banyaknya masyarakat yang kurang mampu belum memilki akta kelahiran
3. Banyak masyarakat yang belum tahu tentang keutamaan dan fungsi dari sebuah akta kelahiran
4. Lamanya proses pembuatan akta kelahiran serta rumitnya proses yang harus dilalui masyarakat Desa

Dari keempat faktor tersebut yang paling sering terjadi yaitu poin yang pertama, tentang sosialisai aparatur Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ketapang. Jarak tempuh yang jauh antara pusat Kota dan Desa di duga salah satu kendala minimnya sosialisasi yang diberikan oleh aparatur Dinas Kependudukan dan Pencatatn Sipil Kabupaten Ketapang.

1.1. Pembatasan Permasalahan

Untuk dapat mengkaji dengan baik suatu implementasi kebijakan publik perlu diketahui variabel atau faktor-faktor penentunya. Untuk menggambarkan secara jelas variabel atau faktor-faktor yang berpengaruh penting terhadap implementasi kebijakan publik serta guna penyederhanaan pemahaman, maka akan digunakan model-model implementasi kebijakan. Edwards III (dalam Widodo, 2006:96) berpendapat dalam model implementasi kebijakannya bahwa keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh faktor-faktor sebagai berikut:

1. *Bureaucratic structure* (struktur birokrasi)
2. *Resources* (sumber daya*)*
3. *Disposition* (sikap pelaksana)
4. *Communication* (komunikasi)

Diantara keempat faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan tersebut maka peneliti membatasi penelitian pada faktor komunikasi.

1.2. Rumusan Permasalahan

Berdasarkan uraian yang dikemukakan di atas, maka rumusan masalah dalam penulisan skripsi ini adalah: Seberapa besar pengaruh komunikasi terhadap implementasi kebijakan Akta Kelahiran Di Desa Sungai Besar Kecamatan Matan Hilir Selatan Kabupaten Ketapang ?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui komunikasi yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Ketapang dalam pembuatan akta kelahiran di Desa Sungai Besar
2. Untuk mengetahui implementasi Kebijakan akta kelahiran di Desa Sungai Besar Kecamatan Matan Hilir Selatan Kabupaten Ketapang
3. Untuk mengetahui pengaruh komunikasi terhadap implementasi kebijakan Akta Kelahiran Di Desa Sungai Besar Kecamatan Matan Hilir Selatan Kabupaten Ketapang

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis

   Penelitian ini diharapkan berguna untuk pengembangan teori dan menambah pengetahuan di bidang kebijakan publik khususnya tentang implementasi kebijakan publik.

2. Manfaat Praktis

   Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan masukan untuk meningkatkan sosialisasi yang dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kepada seluruh masyarakat ada di Kabupaten Ketapang. Serta memberikan informasi kepada masyarakat Desa sungai Besar tentang pentingnya membuat akta kelahiran.

B. KERANGKA TEORI DAN METODE

1. Kerangka Teori

A. Implementasi Kebijakan

Implementasi merupakan tahapan yang paling krusial dalam suatu kebijakan, suatu kebijakan harus diimplementasikan agar dapat dirasakan oleh semua masyarakat. Ripley dan Franklin (dalam Winarno,2012:148) berpendapat bahwa implementasi adalah apa yang terjadi setelah undang – undang ditetapkan yang memberikan otoritas program, keuntungan, atau suatu keluaran jenis yang nyata. Dari uraian diatas dijelaskan bahwa implementasi kebijakan merupakan praktek dari undang – undang yang telah ditetapkan.

Adapun makna Implementasi menurut Daniel A. Mazmanian dan Paul Sabatier (dalam Nugroho,2009:629) mengatakan bahwa implementasi merupakan upaya untuk melaksanakan keputusan kebijakan. Pernyataan Daniel A. Mazmanian dan Paul Sabatier setelah diterjemahkan adalah sebagai berikut:

> "Implementasi adalah memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijaksanaan yakni kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijaksanaan negara, yang mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat/dampak nyata pada masyarakat atau kejadian kejadian.

Implementasi kebijakan merupakan kegiatan yang kompleks dengan begitu banyak faktor yang mempengaruhi keberhasilan suatu implementasi kebijakan. Dalam mengkaji implementasi kebijakan publik, Edward III (dalam Agustino,2008 : 149) menjelaskan 4 variabel yang mempengaruhi implementasi kebijakan, faktor – faktor tersebut antara lain :

1. Komunikasi
2. Sumber daya
3. Disposisi
4. Struktur birokrasi

Berikut ini dijelaskan 4 variabel yang mempengaruhi suatu implementasi kebijakan, 4 variabel tersebut merupakan faktor penting terlaksananya suatu kebijakan. Adapun faktor – faktor yang mempengruhi implementasi kebijakan antara lain :

1. Komunikasi

Menurut Agustino (2008:150); "komunikasi merupakan salah-satu variabel penting yang mempengaruhi implementasi kebijakan publik, komunikasi sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan publik". Implementasi yang efektif akan terlaksana, jika para pembuat keputusan mengetahui mengenai apa yang akan mereka kerjakan. Infromasi yang diketahui para pengambil keputusan hanya bisa didapat melalui komunikasi yang baik. Terdapat tiga indikator yang dapat digunakan dalam mengkur keberhasilan variabel komunikasi. Edward III (dalam Agustino,2008:150-151) mengemukakan tiga variabel tersebut yaitu: Tranmisi, Kejelasan, dan Konsistensi.

2. Sumber Daya

Menurut Tachjan (2006:135) Sumber daya diposisikan sebagai *input* dalam organisasi sebagai suatu sistem yang mempunyai implikasi yang bersifat ekonomis dan teknologis. Secara ekonomis, sumber daya bertalian dengan biaya atau pengorbanan langsung yang dikeluarkan oleh organisasi yang merefleksikan nilai atau kegunaan potensial dalam transformasinya ke dalam *output*. Sedang secara teknologis, sumberdaya bertalian dengan kemampuan transformasi dari organisasi.

3. Struktur Birokrasi

Birokrasi merupakan salah-satu institusi yang paling sering bahkan secara keseluruhan menjadi pelaksana kegiatan. Keberadaan birokrasi tidak hanya dalam struktur pemerintah, tetapi juga ada dalam organisasi-organisasi swasta, institusi pendidikan dan sebagainya. Bahkan dalam kasus-kasus tertentu birokrasi diciptakan hanya untuk menjalankan suatu kebijakan tertentu. Ripley dan Franklin (dalam Winarno,2012:205) mengidentifikasi enam karakteristik birokrasi sebagai hasil pengamatan terhadap birokrasi di Amerika Serikat, yaitu:

1. Birokrasi diciptakan sebagai instrumen dalam menangani keperluan-keperluan publik *(public affair).*
2. Birokrasi merupakan institusi yang dominan dalam implementasi kebijakan publik yang mempunyai kepentingan yang berbeda-beda dalam setiap hierarkinya.
3. Birokrasi mempunyai sejumlah tujuan yang berbeda.
4. Fungsi birokrasi berada dalam lingkungan yang kompleks dan luas.
5. Birokrasi mempunyai naluri bertahan hidup yang tinggi dengan begitu jarang ditemukan birokrasi yang mati.
6. Birokrasi bukan kekuatan yang netral dan tidak dalam kendali penuh dari pihak luar.

4. Disposisi

Menurut Edward III (dalam Winarno, 2012:142-143) mengemukakan kecenderungan-kecenderungan atau disposisi merupakan salah satu faktor yang mempunyai konsekuensi penting bagi implementasi kebijakan yang efektif. Jika para pelaksana mempunyai kecenderungan atau sikap positif atau adanya dukungan terhadap implementasi kebijakan maka terdapat kemungkinan yang besar implementasi kebijakan akan terlaksana sesuai dengan keputusan awal. Demikian sebaliknya, jika para pelaksana bersikap negatif atau menolak terhadap implementasi kebijakan karena konflik kepentingan maka implementasi kebijakan akan menghadapi kendala yang serius.

B. Komunikasi

Menurut Hovland dalam (Mulyana,2007:68) Komunikasi adalah suatu proses melalui mana seseorang (komunikator) menyampaikan stimulus (biasanya dalam bentuk kata-kata) dengan tujuan mengubah atau membentuk perilaku orang-orang lainnya (khalayak). Sementara itu Berelson dan Stainer (Mulyana, 2007:68) Komunikasi adalah proses penyampaian informasi, gagasan, emosi, keahlian, keterampilan dan lain-lain. Melalui penggunaan simbol-simbol seperti kata-kata, gambar-gambar, angka-angka dan lain-lain.

Pakar komunikasi lain, Joseph A Devito (dalam Suprapto, 2011:7) mengemukakan komunikasi sebagai transaksi. Transaksi yang dimaksudkannya bahwa komunikasi merupakan suatu proses dimana komponen-komponennya saling terkait dan bahwa para komunikatornya beraksi dan bereaksi sebagai suatu kesatuan dan keseluruhan. Dalam setiap proses transaksi, setiap elemen berkaitan secara integral dengan elemen lain.

a. Fungsi Komunikasi

Komunikasi dipandang dari arti yang lebih luas, tidak hanya diartikan sebagai pertukaran berita dan pesan tetapi komunikasi mencakup berbagai kegiatan individu dan kelompok mengenai tukar menukar data, fakta, dan ide. Menurut Widjaja (2008:9) ada 8 fungsi komunikasi yaitu :

1. Informasi
2. Sosialisasi
3. Motivasi
4. Perdebatan dan diskusi

5. Pendidikan
6. Memajukan kebudayaan
7. Hiburan
8. Integrasi

b. Tujuan Komunikasi

Berlo (dalam Hasan, 2005:26) mengemukakan tujuan komnikasi dapat ditinjau dari dua aspek, yakni aspek yang bersifat umum dan aspek yang bersifat spesifik. Tujuan komunikasi dilihat secara umum meliputi hal-hal berikut :

1. Informative

2. Persuasive

3. Entertainment

Sedangkan tujuan komuikasi yang bersifat spesifik dikemukakan oleh Berlo (dalam Hasan, 2005:26) sebagai berikut :

1) Suatu kondisi yang tidak kontradiktif secara logika tau tidak konsisten dengan komunikasi itu sendri;
2) Berpusat pada perilaku, yaitu diekspresikan dalam pengertian perilaku manusia;
3) Cukup relevan bagi kita untuk menghubungkannya dengan perilaku komunikasi yang actual;
4) Konsisten dengan cra-ara orang berkomunikasi.

Dari pengertian komunikasi secara umum dan secar spesifik, dapat disimpulkan bahwa tujuan komunikasi pada hakekatnya adalah mencapai pengertian bersama antara komunikator dan komunikan.

c. Model Komunikasi

a. Model Lasswell

Salah satu model kounikasi yang tua tetapi masih digunakan orang untuk tujuan tertentu adalah model komunikasi yang dikemikakan oleh Harold Lasswell (forsdale 1981), seorang ahli politik dari Yale University. Dalam hal ini Harold Lasswell menggunakan lima pertanyaan yang peerlu ditanyakan dan dijawab dalam melihat proses komunikasi, yaitu *who* (siapa), *says wahat* (mengatakan apa), *in which medium* atau dalam media apa, *to whom* atau kepada siapa, dan dengan *what effect* atau apa efeknya.

b. Model Shannon

Model komunikasi lain yang banyak di gunakan adalah model komunikasi dari Claude Shannon atau lebih terkenal dengan model Shannon Wever. Model ini berbeda dengan model Lasswell mengenai istilah yang di gunakan bagi masing-masing komponen seperti :

a. Sumber Informasi *(Informasi Source)*

b. Transmitter

c. Penyandiaan (*enconding*) pesan

d. Penerimaan dan *decoding*

e. Tujuan

f. Sumber gangguan

2. Metode Penelitian

Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode kuantitatif. Metode ini digunakan untuk menjelaskan kedudukan variabel-variabel yang diteliti serta hubungan antara satu variabel dengan variabel yang lain. Penelitian ini dilakukan di Desa Sungai Besar Kecamatan Matan Hilir Selatan Kabupaten Ketapang. Populasi dalam penelitian ini yaitu seluruh Kepala Keluarga yang belum memiliki akta kelahiran yang berjumlah 248 orang. Adapun yang menjadi sampel dalam penelitian ini yaitu 71 oraang.

Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu :

a. Dokumentasi :

Analisis dokumen dilakukan untuk mengumpulkan data yang bersumber dari arsip dan dokumen baik yang berada di Desa Sungai Besar, Kecamatan Matan Hilir Selatan Maupun Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang yang ada hubungannya dengan penelitian tersebut.

b. Penyebaran angket/kuesioner :

Yaitu dengan membagikan angket yang berisi beberapa altermatif jawaban kepada responden yang berisi indikator-indikator variabel yang bersangkutan.

c. Wawancara :

Wawancara merupakan merupakan meetode pengumpulan data yang digunakan peneliti untuk memperoleh informasi dari para implementor. Dengan wawancara tersebut maka akan mempermudah peneliti untuk mengetahui seberapa besar sosialisasi yang telah dilakukan oleh implementor.

Teknik analisis data yang dilakukan yaitu dengan menggunakan Korelasi *Product Moment* dan Analisis Regresi.

Teknik keabsahan data yang digunakan yaitu :

a. Uji Validitas
   Yaitu dengan menggunakan SPSS v.19 untuk menghitung nilai korelasi
b. Uji Reliabilitas
   Yaitu menggunakan SPSS v.19 dengan rumus Alfa Croanbach.

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil deskripsi variabel komunikasi tanggapan responden mengenai komunikasi yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang sebanyak 6 orang (8,45%) menyatakan tidak baik, 32 orang (45,07%) menyatakan kurang baik, 24 orang (33,80%) menyatakan baik, dan sebanyak 9 orang (12,67%) menyatakan sangat baik. komunikasi yang dilakukan oleh aparat pemerintah Kabupaten Ketapang yang dalam hal ini dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Ketapang sebagian besar termasuk dalam klasifikasi kurang baik. Sama halnya jika dilihat dari skor rata rata (2119/71= 29,84) maka komunikasi yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang masih diklasifikasikan dalam masuk dalam kategori kurang baik. Hasil deskripsi variabel implementasi kebijakan akta kelahiran, tanggapan responden mengenai pelaksanaan implementasi kebijakan akta kelahiran di Desa Sungai Besar sebanyak 3 orang (4,22%) menyatakan tidak baik, 40 orang (56,33%) menyatakan kurang baik, 25 orang (35,21%) menyatakan baik, dan sebanyak 3 orang (4,22%) menyatakan sangat baik. Dari hasil perhitungan pernyataan responden tentang pelaksanaan implemtasi kebijakan akta kelahiran yang dilakukan oleh aparat pemerintah Kabupaten Ketapang yang dalam hal ini dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Ketapang sebagian besar termasuk dalam klasifikasi kurang baik. Sama halnya jika dilihat dari skor rata rata (1812/71= 25,52) maka komunikasi yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang masih diklasifikasikan dalam masuk dalam kategori kurang baik.

Pengaruh komunikasi terhadap implementasi kebijakan akta kelahiran di Desa Sungai Besar tergolong dalam kategori kuat dengan nilai r_p yang dihitung melalui program SPSS V.19 = 0,611 serta memilki pengaruh yang signifikan karena t hitung (6,41)lebih besar daripada t tabel (1,667). Dengan demikian pengaruh komunikasi terhadap implementasi kebijakan akta kelahiran di Desa Sungai Besar sebesar 37,33 % sedangkan sisanya yaitu sebesar 62,67 dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

D. KESIMPULAN

1. Dari hasil penelitian Pengaruh komunikasi terhadap implementasi kebijakan akta kelahiran di Desa Sungai Besar Kecamatan Matan Hilir Sealatan Kabupaten Ketapang, diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

a. Komunikasi yang telah dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Ketapang melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Desa Sungai Besar masih tergolong dalam klasifikasi kurang baik. Hal ini terbukti dengan hasil penyebaran angket kepada Masyarakat tercatatat 8,45 % menyatakan tidak baik, 45,07 %

menyatakan kurang baik, 33,80 % menyatakan menyatakan baik, dan 12,67 % menyatakan sangat baik. Dari persentase tersebut menunjukan bahwa komunikasi yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil belum maksimal.

b. Implementasi kebijakan akta kelahiran di Desa Sungai Besar masih belum terlaksana dengan baik. Hal ini terbukti dengan hasil penyebaran angket kepada Masyarakat tercatatat 4,22% menyatakan tidak baik, 56,33 % menyatakan kurang baik, 35,21 % menyatakan menyatakan baik, dan 4,22 % menyatakan sangat baik. Dari persentase tersebut menunjukan bahwa Implementasi kebijakan akta kelahiran di Desa Sungai Besar belum terlaksana dengan baik.

c. Terdapat pengaruh yang signifikan antara komunikasi terhadap implementasi kebijakan akta kelahiran di Desa Sungai besar Kecamatan Matan Hilir Selatan Kabupaten Ketapang yang ditunjukkan dengan Hasil koefisien korelasi *product moment* dengan taraf signifikan (α) 5% yaitu sebesar 0,611 dan koefisien determinasi sebesar 37,33%. Hal ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan akta kelahiran di Desa Sungai Besar di pengaruhi oleh komunikasi sebesar 37,33%, sedangkan 62,67% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak dibahas dalam penelitian ini.

2. Keterbatasan Studi

Adapun keterbatasan dalam pelaksanaan penelitian ini yaitu :

1. Pemahaman responden yang kurang memadai mengenai penelitian ini, seperti rasa takut untuk menjawab kuesioner yang disebarkan akan mempengaruhi citra diri responden itu sendiri, sehingga perlu meyakinkan responden agar mau mengisi kuesioner yang disebarkan.
2. Keterbatasan waktu yang dimiliki oleh responden untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dalam kuesioner menyebabkan responden kurang fokus dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diberikan.

3. Apresiasi

Pada kesempatan ini, saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh aparatur di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang, Pemerintah Kecamatan Matan Hilir Selatan, dan seluruh masyarakat Desa Sungai Besar yang telah bersedia menjadi responden dalam penelitian ini karena telah banyak memberikan bantuan kepada peneliti sehinggapenelitian ini dapat terselesaikan.

DAFTAR PUSTAKA

Literatur Buku Bacaan

Agustino, Leo. 2008. *Dasar – Dasar Kebijakan Publik*. Bandung : Alfabeta

Bungin, Burhan. 2005. *Metotologi penelitian kuantitatif, komunikasi, ekonomi, dan kebijakan public serta ilmu – ilmu sosial lainya*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group

Hardjanto, Arif. 2008. *Implementasi Kebijakan Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kelurahan Gisikdrono Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang*. Skripsi.

Hasan, Erliana. 2005. *Komunikasi Pemerintahan*. Bandung : PT Refika Aditama.

Maturus, Teodulus. 2012. *Pengaruh Komunikasi terhadap Efektifitas Implementasi Kebijakan Tertib kebersihan di Kecamatan Pontianak Kota*. Skripsi . Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Tanjungpura Pontianak.

Muhammad, Arni. *Komunikasi Organisasi*. Jakarta : PT Bumi Aksara

Mulyana. 2007. *Ilmu komunikasi suatu pengantar*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya

Nugroho, Riant. 2011. *Public Policy, dinamika kebijakan – analisis kebijakan – manajemen kebijakan*. Jakarta : PT Elex Media Komputindo Kelompok Gramedia : Jakarta

Nurudin. 2004. *Sistem Komunikasi Indonesia*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada

Prasetyo, Bambang dan Lina Miftahul Jannah.2012. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Romli, Komsahrial. 2011. *Komunikasi Organisasi.* Jakarta : PT Grasindo

Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D.* Bandung: Alfabeta.

------, 2011. *Statistika Untuk Penelitian*. Bandung: Alfabeta.

Suprapto, Tommy. 2011. *Pengantar Ilmu Komunikasi dan peran manajemen dalam komunikasi.* Jakarta : CAPS

Purwanto, Erwan Agus dan. Sulistyastuti, Dyah Ratih 2012. *Implementasi Kebijakan Publik, Konsep dan aplikasinya di Indonesia.* Yogyakarta : Gava Media

Tachjan, H. 2006. *Implementasi Kebijakan Publik*, . Bandung : Asosiasi Ilmu Politik Indonesia(AIPI)

Wahab, Solichin A. 1991. *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan*, Jakarta : Bumi Aksara.

Wardani, Hesti Ayu. 2012. *Pengaruh Komunikasi terhadap Efektifitas Implementasi Kebijakan Tertib kebersihan di Kecamatan Pontianak Kota.* Skripsi . Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Tanjungpura Pontianak.

Widjaja, H.A.W. 2008. *Komunikasi, Komunikasi Dan Hubungan Masyarakat*, Jakarta : PT Bumi Aksara

Widodo, Joko. 2008. *Analisis Kebijakan Publik, Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik.* Malang : Bayumedia Publishing

Winarno, Budi. 2012. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*, Media Pressindo Yogyakarta.

PeraturanPemerintah

Peraturan Daerah Kabupaten Ketapang NO 18 Tahun 2009 tentang adminitrasi kependudukan

Undang Undang No 23 tahun 2006 tentang admimistrasi kependudukan

Undang Undang NO 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah

Media Elektronik

Harian Equator, *440.239 Warga Belum Membuat Akta*. Melalui http://www.equator-news.com/lintas-selatan/ketapang/20111006

Ricky, *Tujuan dan fungsi komunikasi*, melalui http://sulastomo.blogspot.com/fungsi-dan-tujuan-komunikasi.html /2010/12/3

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
PENGELOLA JURNAL MAHASISWA
Jalan A Yani Pontianak, Kotak Pos 78124
Homepage : http://jurnalmahasiswa.fisip.untan.ac.id
Email :jurnalmhs@fisip.untan.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH/PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK JURNAL ELEKTRONIK MAHASISWA

Sebagai sivitas akademika Universitas Tanjungpura, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama Lengkap : H I D A Y A T
NIM / Periode lulus : E42009026/ 2013
Fakultas / Jurusan : FISIP / ILMU ADMINISTRASI
Email address/HP : dayat_borneo28@yahoo.co.id / 085245226634

demi pengembangan ilmu pengetahuan dan memenuhi syarat administrasi kelulusan mahasiswa (S1), menyetujui untuk memberikan kepada Pengelola Jurnal Mahasiswa Ilmu Administrasi pada Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-Exlusive Royalti-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

PENGARUH KOMUNIKASI TERHADAP IMPLEMENTASI KEBIJAKAN AKTA KELAHIRAN DI DESA SUNGAI BESAR KECAMATAN MATAN HILIR SELATAN KABUPATEN KETAPANG

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini, Pengelola Jurnal berhak menyimpan, mengalih-media/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di internet atau media lain :

☐ fulltext
☐ content artikel sesuai dengan standar penulisan jurnal yang berlaku.

untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/ pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak pengelola jurnal, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya saya ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Mengetahui/disetujui
Pengelola Jurnal PRODI IP 7/14
2

H. WijayaKusuma, MA, Ph.D
NIP. 196202141986031001

Dibuat di : Pontianak
Pada Tanggal : 5 Februari 2014

(H I D A Y A T)